

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah,

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen juga sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tersebut, maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Strategis tahun 2016–2021. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016–2021 adalah merupakan dokumen

perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016–2021 dalam bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Selain itu urgensi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah;
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance);
3. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016– 2021.

Dokumen Rencana Strategis ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan misi Bupati Kebumen sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing- masing program tersebut.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah kabupaten Tahun 2004 Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Organisasi;
24. Peraturan Bupati kebumen Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

C. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen periode Tahun 2016-2021.

1. Maksud.

- a. memberikan gambaran kondisi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara profesional;
- b. memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggung-jawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2. Tujuan

- a. sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. merumuskan dan menetapkan arah dan strategi bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;
- c. mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berorientasi pada hasil;
- d. menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan kewenangan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran;
- e. menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan jajarannya secara proporsional.

D. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PPKB

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINSOS PPKB
- B. Sumber Daya DINSOS PPKB
- C. Kinerja Pelayanan DINSOS PPKB
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinsos PPKB
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen
- C. Identifikasi Isu-isu strategis
- D. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi Bupati Kebumen
- B. Misi Bupati Kebumen
- C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINSOS PPKB
- D. Perumusan Strategis dan Kebijakan DINSOS PPKB

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

- A. Pedoman Transisi
- B. Kaidah Pelaksanaan

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas pokok

Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
2. perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang

rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;

6. pelaksanaan administrasi Dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
6. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

2.2. Subbagian Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

2.3. Subbagian Keuangan

Mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas. tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

3. Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Tugas Pokok

Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan, pengembangan usaha sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional, penanganan bencana, program keluarga harapan, pengembangan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberian izin undian dan pengumpulan sumbangan sosial serta pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

1. fasilitasi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
2. fasilitas dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial;

3. pemberian dukungan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN);
4. penanganan bencana melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiaga-an penanggulangan bencana;
5. pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
6. pembinaan dan pengembangan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. pemberian izin undian dan pengumpulan sumbangan sosial;
8. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
9. pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
10. pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui usaha ekonomis produktif (perseorangan atau kelompok);
11. pembinaan dan penilaian terhadap organisasi sosial kemasyarakatan/yayasan;
12. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin, Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pemberdayaan terhadap keluarga miskin

3.2. Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan beras miskin, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan kepada para operator dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana, pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA), pembinaan dan pengawasan

perizinan undian dan pengumpulan barang serta jaminan sosial.

3.3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan sosial pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, peningkatan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melaksanakan pola kerjasama dan kemitraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional, pelestarian nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan, pembinaan kepada keluarga perintis kemerdekaan dan pahlawan termasuk veteran dan keluarganya.

4. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

a. Tugas Pokok

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan, fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, penanganan terhadap eks korban penyalahgunaan narkoba alkohol psikotropika dan zat adiktif lain, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, pemeliharaan anak terlantar dan penanganan lanjut usia.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai fungsi:

1. fasilitasi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
2. fasilitas dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial;
3. pemberian dukungan usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, eks warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan *Human Immuno Deficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* dan Pekerja Seks Komersial (PSK), orang terlantar;
4. penanganan terhadap eks korban penyalahgunaan narkoba alkohol psikotropika dan zat adiktif lain;

5. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
6. pemeliharaan anak terlantar termasuk penanganan proses adopsi anak;
7. penanganan lanjut usia melalui sistem panti dan non panti;
8. pemberian bantuan kepada orang terlantar/kehabisan bekal berdasarkan laporan dari kepolisian;
9. pengawasan penempatan pekerja sosial non fungsional panti sosial swasta; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu disabilitas netra, disabilitas tubuh, disabilitas mental, tuna rungu wicara, cacat ganda, eks psikotik dan eks penyandang penyakit kronis, serta Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pelaksanaan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta pembinaan kepada para pendamping penyandang disabilitas.

4.2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), waria, orang dengan *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba alkohol psikotropika dan zat adiktif lain, rehabilitasi tuna sosial, koordinasi penanggung-an gelandangan, pengemis, pembinaan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial serta pemantauan perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial

4.3. Seksi Rehabilitasi Pelayanan, Penyantunan Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Pelayanan, Penyantunan Anak dan Lanjut Usia sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

pemberikan bimbingan sosial dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan dan anak dalam perlindungan khusus (panti dan non panti), pemberian pelayanan dan bantuan sosial bagi lanjut usia baik melalui panti dan non panti, pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan/Panti Sosial, penyiapan bahan dan pelaksanaan proses pengangkatan anak (adopsi anak), pembinaan, bantuan dan pengendalian terhadap penyantunan anak, koordinasi dan pemberian pembinaan kepada para Satuan Bhakti Pekerja Sosial dan Pendamping Asistensi Lanjut Usia

5. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Tugas Pokok

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komunikasi, informasi dan edukasi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
2. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
4. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
5. pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
6. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB di Daerah;
7. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
8. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
9. penanganan kesehatan reproduksi; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyusunan parameter kependudukan, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah, kerjasama institusi lain di bidang kependudukan dan penyusunan Profil Kependudukan Daerah.

5.2. Seksi Keluarga Berencana

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi keluarga berencana, Pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, penyuluhan keluarga berencana, pemutakhiran data keluarga berencana, pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan penanganan kesehatan reproduksi.

5.3. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di lini lapangan, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada mitra kerja, promosi kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media.

6. Bidang Keluarga Sejahtera

a. Tugas Pokok

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah dalam pembangunan keluarga, pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa, serta pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga;
3. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
4. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja;
5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia;
6. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa;
7. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan keluarga sejahtera; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Pembangunan Keluarga

Seksi Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan keluarga, sosialisasi dan desiminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di tingkat wilayah, penguatan ketahanan keluarga mencakup Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera tingkat kecamatan, fasilitasi asosiasi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, pembinaan dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa serta promosi pameran dan gelar dagang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

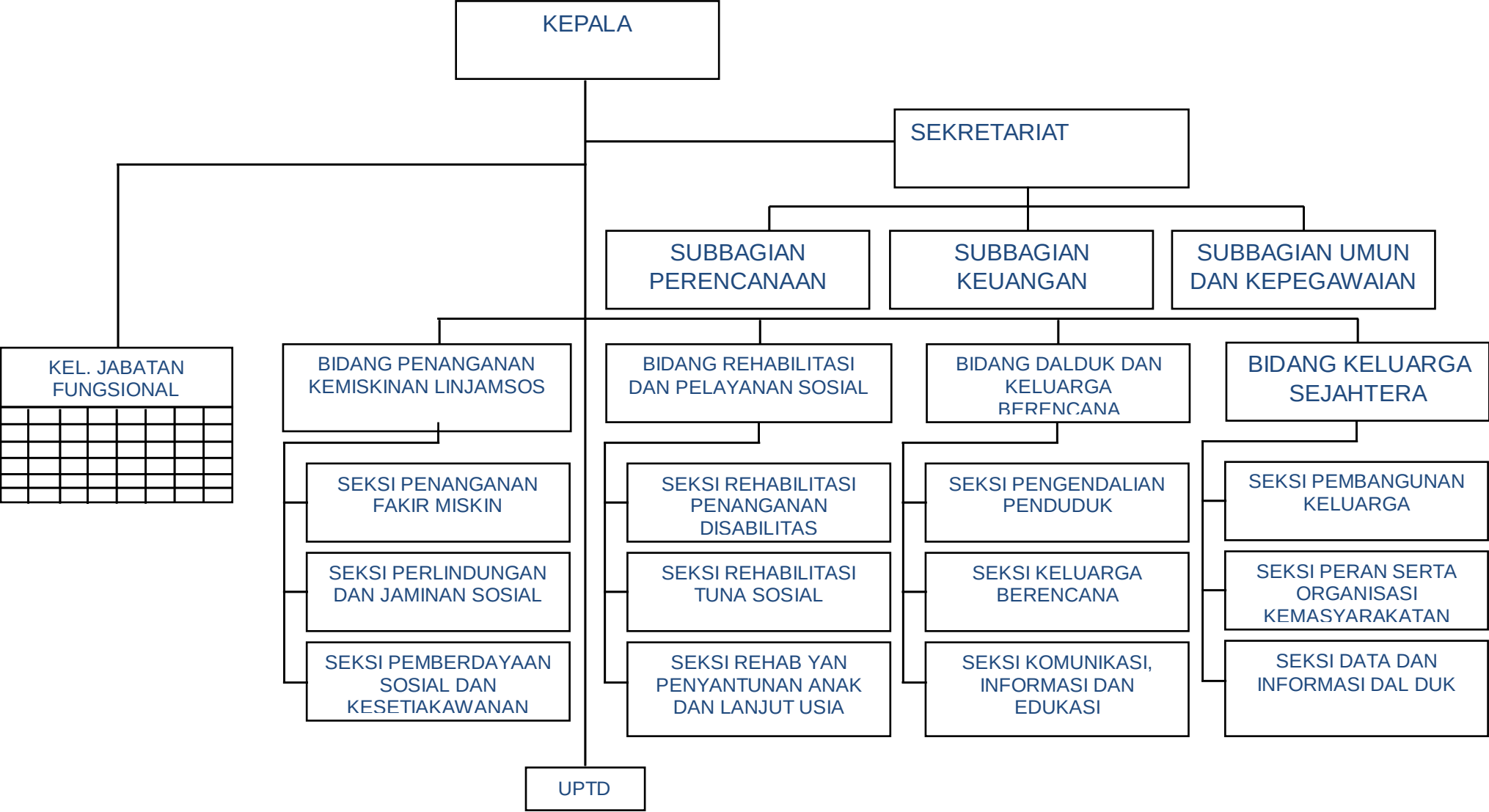
6.2. Seksi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

Seksi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis terhadap peran serta organisasi kemasyarakatan, pembinaan institusi

masyarakat pedesaan, peningkatan motivasi peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, kerjasama dengan mitra kerja, penilaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

6.3. Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk

Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengolahan data informasi kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga, pengembangan data kependudukan, pendataan dan *updating* data keluarga, sarasehan data kependudukan, penyusunan data basis perencanaan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pencatatan, pelaporan dan penyusunan umpan balik.



B. Sumber Daya OPD

b.1. Jumlah Karyawan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada akhir bulan September 2017 sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) orang terdiri dari 47 orang Pejabat Eselon (26 orang Ka. UPT) , 59 orang Fungsional (Penyuluh KB) dan 27 orang Fungsional umum.

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen bulan September 2017

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN						DIKLAT YG DIKUTI		
	IV	III	II	I	Non PNS	Jml	S2	S1	SMA	SMP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESLON II	1					1	1					1	1		1
ESLON III	4	1				5	4	1				5	5		5
ESELON IV	13	28				41	4	37				41	41		41
FUNGSIONAL UMUM		13	14			27		8	19			27			27
FUNGSIONAL KUSHUS	18	41				59	2	34	23			59		59	59
JUMLAH	36	83	14			133	11	80	42			133			133

B.2. Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung untuk pelaksanaan tugas sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.2.

Sarana dan Prasaran
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	Tanah dan Bangunan kantor	Baik	8 unit
2	Bangunan Gedung kantor permanen	Baik	28 unit
3	Bangunan Tempat kerja lain	Baik	9 unit
4	Mobil	Baik	3 unit
5	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Baik	1 unit
6	Mobil Pengangkut aseptor KB	Baik	1 unit
7	Mobil Khusus lainnya	Baik	1 unit
8	Kendaraan roda dua dinas KB	Baik	148 unit
9	Kendaraan roda dua dinas	Baik	5 unit
10	Mesin ketik manual	Baik	13 unit
11	AC	Baik	9 unit
12	Kipas angin	Baik	34 buah
13	Exhause fan	Baik	26 buah
14	Televisi	Baik	2 buah
15	Saund system	Baik	28 buah
16	PC unit	Baik	20 unit
17	Note Book	Baik	69 unit
18	Printer	Baik	38 unit
19	Meja kerja Es	Baik	25 buah
20	Kursi kerja Es	Baik	47 buah
21	Proyektor + Attachment	Baik	7 buah
22	Camera Electronic	Baik	65 buah
23	Handycam	Baik	1 buah
24	Telephone	Baik	1 buah
25	Fax	Baik	1 buah
26	Brangkas	Baik	1 buah
27	Rak Kayu	Baik	26 buah
28	Filing Besi	Baik	4 buah
29	Lemari kayu	Baik	31 buah
30	Lemari kaca	Baik	3 bual
31	Electric Generating set	Baik	1 buah
32	White board	Baik	26 buah

C. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terkait dengan tugas dan fungsi dengan mengacu Rencana Strategis 2016 sampai dengan 2021 melalui program peningkatan sistem pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dapat dijelaskan dengan sebagai berikut:

- 1. Implementasi pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 diarahkan pada 2 (dua) target yakni
 - (a) Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta melaksanakan 2 (dua) pendekatan yakni penanganan PMKS berbasis kelembagaan melalui Balai Rehabilitasi Sosial dan berbasis peran serta masyarakat bekerjasama dengan Institusi Sosial di Kabupaten/Kota.

Tabel 2.3.
Hasil Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen
Tahun 2013– 2016

Tahun 2013	Populasi PMKS	215.814
	Penanganan	2.566
	PMKS yang memperoleh bantuan social	246
Tahun 2014	Populasi PMKS	211.808
	Penanganan	1.539
	PMKS yang memperoleh bantuan social	1.410
Tahun 2015	Populasi PMKS	211.808
	Penanganan	31.393
	PMKS yang memperoleh bantuan social	30.518
Tahun 2016	Populasi PMKS	210.208
	Penanganan	50.451
	PMKS yang memperoleh bantuan social	49.518

Populasi PMKS tahun 2016 sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.
Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2016

NO	JENIS PMKS	2013	2014	2015	2016
1	Anak jalanan	284	334	334	334
2	Penderita sakit jiwa	311	352	352	352
3	Gepeng	197	175	175	175
4	Fakir miskin	180.345	180.363	180.	180.
5	Bayi terlantar	661	271	271	271
6	Anak Terlantar	1.659	743	743	743
7	Lanjut Usia terlantar	1.480	2.806	2.80	2.80
8	Penyandang Tuna netra	1.690	1.690	1.69	1.69
9	Penyandang Tuna rungu	325	325	325	325
10	Penyandang Tuna wicara	1.741	1.717	1.71	1.71
11	Penyandang Tuna rungu-wicara	1.717	1.717	1.71	1.71
12	Penyandang Tuna daksa	2.759	2.763	2.76	2.76
13	Penyandang Tuna grahita	1.220	1.215	1.21	1.21
14	Penyandang cacat jiwa	2.793	2.793	2.79	2.79
15	Penyandang cacat ganda	492	402	402	402
16	Tuna susila	28	28	28	28
17	Bekas Narapidana		558	558	558
JUMLAH					

- (b) Meningkat dan menguatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial PMKS diupayakan melalui penguatan kapasitas dan motivasional PSKS dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana operasional kinerja, pemberian bantuan sarana prasarana organisasi PSKS.

Tabel. 2.5.
Hasil Penguatan Kapasitas Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kebumen Tahun 2014 – 2016

Tahun 2014	Populasi PSKS	569
	PSKS yang mendapat pemberdayaan	58
Tahun 2015	Populasi PSKS	569
	PSKS yang mendapat pemberdayaan	58
Tahun 2016	Populasi PSKS	569
	PSKS ditangani yang mendapat	98

Tabel. 2.6.
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Jenis PSKS	2014	2015	2016
Pekerja Sosial Profesional	2	2	2
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	30	30	30
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	19	21	23
Karang Taruna	460	460	460
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1
Keluarga pioneer			
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)			
Wanita pemimpin kesejahteraan social			
Penyuluh Sosial			
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	26	26	26
Lembaga Swadaya Masyarakat	49	49	49

2. Pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana bagi masyarakat serta meningkatkan jejaring kerja melalui pembangunan bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga meliputi :
- a. Mengendalikan angka kelahiran sebagai upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.
 - b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program KB melalui, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.7.
Data Pasangan Usia Subur (PUS), Un Met Need dan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten KebumenTahun 2014- 2016

	2014	2015	2016
Pasangan Usia Subur	209.502	208.416	208.900
Un met need			
Medis Operasi Wanita			

Medis Operasi Pria			
Implant			

Tabel 2.8.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Kebumen

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD ***)	Target nasional	Target IKK	Target Tahun 2016	Realisas Tahun 2016	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Proyeksi Pencapaian Tahun ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	80%	80 %	74%	80 %	80 %	80%	80%	80%	80%	90 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	80%	80%	40%	40%	40%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase panti sosial yang menyediakan sarana prasaranapelayanan kesejahteraan sosial	60%	60%	60%	100%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD ***)	Target nasional	Target IKK	Target Tahun 2016	Realisas Tahun 2016	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Proyeksi Pencapaian Tahun ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	prasarana tanggap darurat lengkap																
6	Prosentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	70%	90%	60%	60%	60%	65%	70%	74%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang KB	87%	90%	80%	80%	80%	82%	85%	87%	89%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	1%	1,21%	1,13%	1,21%	1,24%	1,28%	1,32%	1,37%	1,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	65%	77%	77%	75%	77,65%	78,00%	78,84%	79,45%	80,75%	80,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Un meet need)	5%	5%	12%	12,96%	12%	11,15%	8,35%	6,15%	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rasio Pembina KB (PPKBD) 1 petugas setiap desa / kelurahan	1 orang	1 orang	1 orang	1 org	1 org / desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD ***)	Target nasional	Target IKK	Target Tahun 2016	Realisas Tahun 2016	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Proyeksi PencapaianTahun ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	Rasio Petugas Lapangan KB (Penyuluh KB) satu penyuluh KB membina desa	2 desa	2 desa	6 desa	6 desa	6 desa	5 desa	4 desa	3 desa	2 desa	2 desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30 %	30 %	0,50%	15%	0,50%	1,00%	1,10%	1,85%	2,00%	2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C.2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.9.

*Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)
Kabupaten Kebumen*

URAIAN/PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata- rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																	
1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	686.769	0	0	0	0	98,11	700.000	98,11
2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	110.000	320.000	550.000	974.597	350.000	0	0	0	0	313.516	0	0	0	0	89,58	0	0
3. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	35.000	130.000	135.000	220.000	200.000	0	0	0	0	171.541	0	0	0	0	85,77	0	0
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																	
1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	30.000	35.000	280.000	185.000	150.000	0	0	0	0	134.132	0	0	0	0	89,42	0	0

URAIAN/PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata- rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal																	
2. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	19.178	0	0	0	0	99,90	0	0
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma																	
1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	15.000	25.000	70.000	165.000	215.000	0	0	0	0	205.942	0	0	0	0	95,97	0	0
Program pembinaan panti asuhan / panti jompo																	
1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	40.000	275.000	275.000	90.000	450.000	0	0	0	0	447.772	0,00	0,00	0,00	0	99,50	0	8
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																	
1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	15.000	30.000	0	70.000	200.000	0	0	0	0	185.328	0,00	0,00	0,00	0	92,66	0	0
Program																	

URAIAN/PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata- rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																	
1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	144.272	134.272	0	0	35.000	0	0	0	0	23.898	0,00	0,00	0,00	0	68,28	0	0
2. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	20.000	20.000	20.000	30.000	35.000	0	0	0	0	32.988	0,00	0,00	0,00	0	94,25	0	0
3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	15.000	30.000	115.000	115.000	425.000	0	0	0	0	409.292	0,00	0,00	0,00	0	96,30	0	0
Program Keluarga Berencana																	
1. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB	1.055.428	1.383.649	1.662.600	1.690.627	1.605.927	1.007.086	1.194.865	1.648.323	1.671.181	1.577.214	95,42	86,36	99,14	98,85	98,21	147,96	95,60
2. Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	897.840	1.011.475	1.102.615	1.420.135	2.040.735	894.666	1.010.172	1.097.519	1.418.827	2.036.994	99,65	99,87	99,54	99,91	99,82	129,46	99,76
3. Pelayanan KIE	15.000	25.000	30.000	65.000	160.000	13.519	24.488	26.261	62.934	155.172	90,12	97,95	87,54	96,82	96,98	59,00	93,88
Program Pelayanan Kontrasepsi																	
1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	44.470	25.000	30.000	30.000	86.800	38.034	22.692	28.882	27.418	76.083	85,53	90,77	96,31	91,39	87,65	43,25	90,33
2. Pengadaan Alat Kontrasepsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pelayanan KB Medis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN/PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata- rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Operasi																	
Program dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduksif.																	
1.Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.	0	0	25.00	65.000	93.124	0	0	22.98	56.397	89.874	0,00	91,93	100	86,76	96,51	36,62	75,04
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga																	
1 .Pemberdayaan BKB,BKR,BKL dan Bina Lembaga Keluarga.	0	0	25.00	30.000	45.000	0	0	24.28	27.376	44.540	0,00	97,16	100%	91,25	98,98	33,33	77,48
Program Penataan Administrasi Kependudukan																	
1. Pengembangan data Base Kependudukan	50.000	50.000	40.00	40.000	45.000	49.570	48.611	37.72	36.534	35.133	99,14	97,22	94,32	91,34	78,07	47,00	92,01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.220	1.500	2.000	2.000	2.000	2.052	1.500	1.996	1.999	1.713	92,41	100	99,78	99,93	85,63	1,94	95,55
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.202	25.000	43.021	46.872	40.259	19.084	21.088	25.828	27.487	29.939	75,73	83,67	60,04	58,64	74,37	36,07	70,49
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	165.474	135.000	160.000	170.000	220.000	159.425	134.375	158.659	155.549	202.893	96,34	99,54	99,16	91,50	92,22	170,09	95,75

URAIAN/PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata- rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.916	30.000	32.000	32.000	34.000	34.198	27.732	30.500	30.504	32.859	97,94	92,44	95,32	95,32	96,64	32,58	95,53
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.540	6.590	10.000	10.000	10.000	8.514	6.590	9.982	9.995	9.894	99,69	100	99,92	99,95	98,94	9,03	99,07
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.500	8.000	12.000	20.000	20.000	7.344	7.965	12.000	19.980	20.000	97,92	99,56	100	99,90	100	13,50	99,48
7. Penyediaan alat tulis kantor	50.735	34.000	40.000	40.000	40.000	50.735	32.746	39.714	39.879	39.882	100	96,31	99,29	99,70	99,71	40,95	99,00
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.387	12.000	14.000	17.000	17.000	18.245	12.000	13.978	16.836	16.937	99,23	100	99,85	99,04	99,63	15,68	99,55
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.723	1.500	3.000	4.000	4.000	1.723	1.500	2.975	3.934	3.621	100	100	99,15	98,34	90,53	2,84	97,60
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.370	1.500	3.000	3.000	2.000	2.249	1.299	1.308	2.283	1.964	94,88	86,57	43,60	76,09	98,00	1,80	79,83
11. Penyediaan makanan dan minuman	52.311	45.000	45.000	46.000	45.000	51.941	44.897	44.698	43.982	43.553	99,29	99,77	99,33	95,61	96,78	46,66	98,16
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	42.550	36.000	45.000	45.000	48.000	42.498	35.924	44.840	44.947	47.989	99,88	99,79	99,64	99,88	99,98	51,81	98,28
13. Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	36.100	30.000	40.000	40.000	37.000	36.028	29.988	38.030	31.688	25.151	99,80	99,96	95,08	79,22	67,98	36,62	88,41
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur																	
1. Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0	34.000	54.000	0	0	0	32.143	52.979	0,00	0,00	0,00	94,54	98,11	44,00	96,33

URAIAN/PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata- rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2. Pengadaan mebeleur	0	0	70.000	30.000	21.000	0	0	69.583	29.034	20.502	0,00	0,00	99,40	96,78	97,63	40,33	97,94
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.640	28.000	15.000	20.000	258.000	5.284	27.887	14.895	19.953	254.745	93,69	99,60	99,30	99,77	98,74	65,33	98,22
5. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	2.410	3.000	3.000	4.000	3.000	2.410	3.000	3.000	3.552	3.000	100	100	100	88,79	100	3,08	97,76
6. Pengadaan Tanah	0	0	0	668.160	0	0	0	0	582.504	0	0,00	0,00	0	87,18	0,00	133,63	17,44
Program Pengembangan Data/Informasi																	
1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	12.000	10.000	15.000	15.000	30.000	11.625	9.501	14.708	13.716	18.312	96,88	95,01	98,06	91,44	61,04	16,40	88,49
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah																	
1. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	
1. Penyusunan rencana	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000	9.509	10.782	10.903	9.427	9.373	95,09	98,02	90,86	78,55	78,11	11,40	88,13

URAIAN/PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaranpada Tahun ke-					Rata- rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
pembinaan karir PNS																	

C.3. Capaian sarana Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah terhadap sasaran Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian

Table 2.10
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terhadap sasaran Renstra Provinsi dan Rencana strategis Kementerian/Lembaga

No	Indikator Kinerja (Indikator sasaran/SPM/IKK/dll)	Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/ Kota	Capaian Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	80%	80%
2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomis sejenis lainnya	80 %	80%	80%
3.	Prosentase panti sosial yang menyediakan sarana prasaranapelayanan kesejahteraan sosial	60%	60%	60%
4.	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	80%	80%
5.	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	80%	80%	80%
6.	Prosentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	40%	40%
7.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 Tahun (SPM 3,5%) tercapai (1,28%)	1,28%	1,28%	1,28%
8.	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB	78%	78%	78%

No	Indikator Kinerja (Indikator sasaran/SPM/IKK/dll)	Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/ Kota	Capaian Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
	aktif (SPM 65%) tercapai (78%)			
9.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need) (SPM5%) belum tercapai masih 11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (SPM70%) tercapai (76%)	76%	76%	76%
11	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber KB (SPM87%) tercapai (83,78%)	83,78%	83,78%	83,78%
12	Rasio petugas lapangan keluarga berencana /penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1(satu) petugas disetiap 2(dua) desa/kelurahan, belum tercapai, saat ini 1 petugas 6 desa. Hal ini karena tidak ada penambahan PNS PKB/PLKB.	6 desa	6 desa	6 desa
13	Rasio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan, tercukupi yaitu ada 460 PPKBD dan 2136 Sub PPKBD untuk tingkat RW.	460 PPKBD dan 2.145 Sub PPKBD	460 PPKBD dan 2.145 Sub PPKBD	460 PPKBD dan 2.145 Sub PPKBD
14	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. Belum tercapai. Sampai saat ini BKKBN Pusat masih memenuhi Alkon yang dibutuhkan Kabupaten/Kota. Plafon penyusunan APBD belum memungkinkan untuk menganggarkan Alkon. Kami	30,00%	30,00%	30,00%

No	Indikator Kinerja (Indikator sasaran/SPM/IKK/dll)	Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/ Kota	Capaian Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
	sampaikan kebutuhan Alkon 30% setahun.			
15	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun, tercukupi, setiap tahun diadakan pemutakhiran data keluarga.	100%	100%	100%

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan bidang sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kebumen yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Tingginya populasi PMKS yang disebabkan tingginya angka Kemiskinan;
- b. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;
- c. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan;
- d. Rendahnya kemandirian dan produktifitas penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- e. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan;
- f. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- g. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- h. Rendahnya pengetahuan masyarakat dan minat masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana.
- i. Tingginya angka *Droup Out* kepersertaan Keluarga Berencana.

- j. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana dengan jumlah desa yang tidak proporsional.
- k. Sarana prasarana yang ada dilapangan tidak proposional dengan tuntutan terhadap pelayanan Keluarga Berencana.
- l. Laju Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat

2. Peluang

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota;
- c. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- d. Banyaknya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Banyaknya jumlah Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dalam penyelenggaraan Keluarga Berencan
- f. Komitmen Mitra Kerja dengan instansi terkait.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya Renstra Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan data, kearsipan dan dokumen penting lainnya.
 - f. Belum optimalnya pengelolaan web site Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
2. Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- a. Tingginya Angka PMKS yang disebabkan tingginya angka kemiskinan.
 - b. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - d. Melemahnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial
 - e. Belum maksimalnya penanganan bencana (alam maupun sosial)
 - f. Belum optimalnya pengolahan data PMKS
3. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
- a. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
 - b. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan.
 - c. Kemandirian dan produktivitas penyandang disabilitas masih rendah.
 - d. Banyaknya Lanjut Usia Terlantar
 - e. Belum optimalnya peran panti Asuhan
4. Bidang Keluarga Berencana
- a. Masih tingginya Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 10,19
 - b. Masih tingginya angka Droup Out peserta KB.
 - c. Rendahnya kesertaan ber KB Pria khususnya MOP.
 - d. Banyaknya pernikahan dini.
 - e. Rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan jumlah peserta Non MKJP.
 - f. Belum Optimalnya peran Kelompok KB Pria dalam

keikutsertaan Advokasi dan KIE KB di lingkungan tempat tinggalnya.

- g. Belum Optimalnya peran Fapsedu dan Koalisi Kependudukan dalam pengendalian penduduk dan KB.

5. Bidang Keluarga Sejahtera.

- a. Pengelolaan data dan informasi kelompok kegiatan (Tri Bina dan UPPKS) belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.
- b. Belum optimalnya pembinaan kelompok UPPKS sehingga belum secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.
- c. Peran PPKBD dan Sub PPKBD belum optimal dalam penggerak an KB MKJP.
- d. Kurangnya peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB.
- e. Belum berfungsinya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang telah terbentuk.
- f. Belum tertibnya dokumen hasil pendataan selama lima tahun.
- g. Masih tingginya rasio jumlah Keluarga Pra Sejahtera & Sejahtera I.
- h. Belum optimalnya peran keluarga dalam pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan dasar sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Kebumen cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

a. Permasalahan

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- 2) Tingkat partisipasi KB masih rendah, baru sekitar 79,94 persen;
- 3) Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang;
- 4) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- 6) Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;
- 7) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal;

- 8) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.

2. Urusan Kesejahteraan Sosial

1. Permasalahan

a. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kemiskinan dalam hal ini diartikan sebagai keadaan dimana kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kemiskinan dapat menjadi sumber atau penyebab munculnya permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan ketunaan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan umum.

Jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen menurut data BPS per 2016 berjumlah 1.188.622 jiwa. Pada tahun 2015 angka kemiskinan mencapai 23,19 % dan pada tahun 2016 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 18,75 % namun masih menduduki nomor dua terbawah angka kemiskinan se Jawa Tengah.

Meskipun terjadi penurunan jumlah, namun kemiskinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius, karena mayoritas termasuk dalam kategori kemiskinan kronis yang terjadi terus menerus. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan.

Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari serta kebijakan publik yang tidak berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial, maka masalah kemiskinan yang dialaminya akan semakin sulit ditangani. Dalam keadaan kritis seperti ini mereka cenderung akan melakukan tindakan asusila, antisosial, perilaku destruktif, dan terlibat permasalahan hukum. Pada akhirnya kemiskinan akan melahirkan masalah sosial lainnya yang dapat mengganggu keberfungsian sosial manusia.

b. Keterlantaran

Keterlantaran disini dimaksudkan sebagai penelantaran Anak dan Lanjut Usia karena berbagai sebab. Anak

merupakan asset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban itu, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial sebagaimana disebutkan dalam UU No 4 Tahun 1979.

Pada tahun 2016 jumlah permasalahan sosial anak di Kabupaten Kebumen yang belum tertangani sebanyak 4.360 anak, yang terdiri anak terlantar, anak nakal, anak cacat, anak yang berhadapan dengan hukum. Saat ini kita dihadapkan juga pada kenyataan semakin banyaknya anak yang mendapat perlakuan salah dan anak yang terpaksa bekerja di tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi. Seperti halnya anak terlantar, masalah utama yang dihadapi oleh anak yang diperlakukan salah dan yang beresiko tinggi, adalah pemenuhan kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dari masalah keterlantaran adalah populasi lanjut usia yang mengalami kecenderungan semakin meningkat jumlah dan kompleksitas permasalahannya padahal keberhasilan pembangunan tercermin pada semakin meningkatnya jumlah lanjut usia dalam struktur kependudukan. Jumlah Lanjut Usia pada tahun 2016 berjumlah 3.760 orang. Kenyataan demikian akan berdampak pada tuntutan peningkatan kemampuan keluarga. Tantangan yang dihadapi adalah diperlukan peningkatan pelayanan sosial bagi lanjut usia agar dapat hidup bahagia dalam suasana aman melalui usaha pelebagaan kehidupan lanjut usia dalam kehidupan bangsa.

c. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial mengindikasikan tidak mampunya seseorang untuk melaksanakan fungsi sosialnya, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya pembentukan pribadi secara normal yang pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal.

Peningkatan permasalahan ketunaan sosial dapat dilihat antara lain dari semakin bertambah dan kompleksnya masalah seperti eks narapidana, gelandangan dan pengemis, serta wanita dan waria tuna susila. Data BNBA tahun 2016

menunjukkan jumlah tuna sosial sebanyak 1.055 orang.

Potret permasalahan lain yang dapat disimak dari ketunaan sosial adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Hal ini terjadi disegala tingkatan usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi, bahkan cenderung semakin banyak pelaku yang terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola penghasilan yang mereka miliki.

Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu, dan mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup meskipun dengan cara yang tidak layak. Mereka hidup dengan cara mengemis, menggelandang, menjual diri bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuan dan tidak utuhnya pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak saja fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang sifatnya pembinaan mental/sosial.

d. Kecacatan

Kecacatan dapat diartikan sebagai hilangnya atau abnormalitas dari fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang. Kecacatan menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau keleluasan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini juga berakibat pada keterbatasan kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja, dan bahkan menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Sisi lain dari kecacatan adalah adanya pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran dan keterasingan.

Data BNBA tahun 2016 menunjukkan jumlah penyandang cacat di Kabupaten Kebumen sebanyak 5.411 jiwa yang terdiri dari anak cacat 795 anak, dan penyandang cacat dewasa 4.616 jiwa. Data BDT tahun 2016 jumlah Disabilitas sebanyak 10.943 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 6.024 jiwa dan perempuan sebanyak 4.889 jiwa.

e. Keterpencilan/Ketertinggalan

Masalah kesejahteraan sosial lain yang terkait

dengan kemiskinan, adalah masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh 180 KK Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa dalam tata kehidupan masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan, baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Hal ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kearah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masalah keterpencilan dan ketertinggalan serta keterasingan yang selama ini dikaitkan dengan soal kemiskinan; dalam arus perubahan yang cepat, telah menjadi masalah kompleks. Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM, lingkungan, Integrasi sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

f. Korban Bencana Alam dan Sosial

Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen memiliki daerah-daerah rawan bencana alam akibat banjir terutama daerah-daerah disekitar sungai- sungai dan tanah longsor di daerah-daerah pegunungan di Kabupaten Kebumen.

Upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana. Namun demikian terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana yang berpusat pada suatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Selain permasalahan yang bersifat konvensional, permasalahan sosial yang bersifat kontemporer juga memerlukan perhatian yang cukup serius. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disasters) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi dan ketidakadilan, kelalaian, ketidak tahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Termasuk dalam ruang lingkup bencana sosial adalah kebakaran rumah penduduk, pelintas batas, orang terlantar, dan orang terdampar akibat kecelakaan perahu.

Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan

kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebumen tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2021 hasil pilkada adalah:

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai

berikut:

- 1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
- 2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
- 3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
- 5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
- 6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
- 7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran sebagaimana Tabel III.1.

Tabel III.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
------	--------	---------

MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI I		
Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
MISI II		
Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat	2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	3. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia
	3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	4. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum
MISI III		
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	5. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
	5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	6. Meningkatnya daya saing investasi daerah
		7. Meningkatnya kunjungan wisatawan
	6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	8. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah
	7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	9. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
MISI IV		

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	10. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
	9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	11. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
MISI V		
Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	12. Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan
		13. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		14. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan
MISI VI		
Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, trans-paran dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	15. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Sumber : Penjabaran Visi dan Misi Bupati Tahun 2016-2021

Adapun target utama pembangunan daerah pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU KABUPATEN)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2017
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,54

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU KABUPATEN)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2017
berkualitas dan berdaya saing		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,93	7,38
		3. Prosentase Cabang Olah Raga yang berprestasi Tingkat Provinsi	70	80
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka Harapan Hidup	72,77	72,95
		5. Angka Kematian Ibu	60	100
		6. Angka Kematian Bayi	10,50	11,00
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	3. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	7. Penurunan Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	307,00	245,00
		8. Persentase Sarana Prasarana Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan dalam kondisi baik	72,6	79,00
		9. Persentase PNS dan BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	20,87	30,00
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	4. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hokum	558	418
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	5. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	5,97	6,31
		12. Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	16.983,67	19.715,60
		13. Rasio/Indeks Gini	0,24*	0,23
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	-	-

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU KABUPATEN)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2017
		terpadu		
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	6. Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	Na	Na
		16. Presentase BUMD dengan predikat sehat	80,00	100,00
	7. Meningkatnya kunjungan wisatawan	17. Persentase pening-katan kunjungan wisata	16,73	17,01
		18. Persentase peningkatan Lama Tinggal Wisatawan	0	100
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	8. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	19. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	55,70	60,86
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	9. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	19. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	75	75
		20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	11,92	12,47
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	10. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	21. Mengurangi Angka Kemiskinan (%)	20,02	18,50
		22. Meningkatkan Peringkat Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah	34	34
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka	11. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	23. Menurunnya Angka Pengangguran	2,09	2,05

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU KABUPATEN)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET 2017
pengangguran				
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	12. Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	24. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	53,30	56,49
	13. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	25. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	73,00	75,75
	14. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	26. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	93,33	100,00
		27. Peningkatan Persentase Akses Sanitasi	65	72
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	15. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	28. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Na	Na
		29. Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B
		30. Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP

Sumber:Penjabaran Visi dan Misi Bupati tahun 2016-2021 Data Diolah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017, ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:

Tabel III.3
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kebumen Tahun 2017

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
	Prioritas 1 Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Prioritas ini mendukung Misi 1 dan 5 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu Misi 1 Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Misi 5 Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat		
1.	Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan	Beasiswa bagi siswa miskin seluruh jenjang
		Peningkatan kualitas dan mutu sarana prasarana pendidikan
		Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
2.	Peningkatan profesionalisme, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
		Pemberian insentif bagi Guru Honorer
3.	Penataan program studi pendidikan formal dan non formal	Peningkatan partisipasi lembaga pendidikan formal dan non formal
		Peningkatan partisipasi program Kejar Paket (A/B/C)
4.	Peningkatan, pengembangan budaya baca	Peningkatan akses perpustakaan dan minat baca masyarakat
		Peningkatan prasarana dan sarana Perpustakaan Daerah
5.	Peningkatan pembinaan kepemudaan, prestasi olahraga, serta apresiasi seni budaya secara tepadu dan terarah	Pembangunan Sarana Olah Raga
		Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga
		Pelestarian nilai-nilai budaya daerah
6.	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Lanjutan Pembangunan dan operasional Rumah Sakit Tipe C Pembun
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
		Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan menjadi Puskesmas Pratama

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan dan pemerataan tenaga medis
7.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar
		Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat
		Optimalisasi sistem jaminan kesehatan
		Peningkatan kesehatan ibu dan anak
		Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi
		Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat
		Peningkatan upaya penanggulangan penyakit menular seperti <i>HIV/AIDs</i> , DBD, Malaria
		Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		<i>Ambulance on Call</i> dan pengobatan gratis bagi keluarga miskin
Prioritas 2 Penanganan Permasalahan Sosial dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Prioritas ini mendukung Misi 2 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu Misi 2 Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pem`erataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat		
1.	Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam penanganan Penyandang	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
	Masalah Kesejahteraan Sosial	
2.	Peningkatan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pembangunan kesejahteraan social
3.	Peningkatan pendidikan keagamaan pada semua tingkat pendidikan dan kelembagaan lainnya	Dukungan pada perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk madrasah, pesantren dan diniyah
		Bantuan operasional masjid, Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah
		Pemberian insentif bagi guru mengaji
		Pengembangan dan pemberdayaan <i>Islamic Centre</i>
		Membudayakan membaca Al-Quran bagi pegawai Pemda dan pelajar yang beragama Islam
4.	Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam trantibmas
5.	Peningkatan koordinasi pencegahan, penanganan konflik	Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, pencegahan, penanganan konflik antar wilayah
7.	Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta Keluarga Berencana	Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan Keluarga Berencana dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarakat
		Intensifikasi penyuluhan/ Komunikasi Informasi Edukasi
		Optimalisasi peran kader/ Institusi Masyarakat
8.	Optimalisasi fungsi keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		program transmigrasi
Prioritas 4 Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Prioritas ini mendukung Misi 4 Bupati Tahun 2016-2021 Misi 4 Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan		
1.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin (Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi, Jamkesda, Bantuan Ekonomi Produktif, Raskin, PKH)
		Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (P2MKM)

Tabel III.3

Prioritas Program Pembangunan Daerah dan Target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2017		
Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	Sosial			
	Cakupan penanganan PMKS	90,51 *	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya;	Disnakertransos
			Bantuan Sosial PMKS	Disnakertransos/ PPKD
			Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (DAK)	DPU/PPKD
			Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana	Bapermasdes /PPKD

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2017		
			Desa (ADD)	
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	Bapermasdes / PPKD
			Bantuan Sosial Desa Berdikari	Bapermasdes / PPKD
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Cakupan rumah layak huni	94,75	Program pengembangan perumahan;	Bapermasdes / DPU / PPKD
			Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu (P2MKM)	Bapermasdes / PPKD
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	32,13	Program Keluarga Berencana	Badan PPKB
	Cakupan Peserta KB Aktif	84,75	Program pelayanan kontrasepsi	Badan PPKB
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang	Badan PPKB

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / INDIKATOR	TARGET 2017		
			mandiri	
			Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Badan PPKB

C. Identifikasi Isu-Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pelaksana teknis dibidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif diperlukan koordinasi yang baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan baik dari unsur pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah :

1. Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang disebabkan oleh tingginya angka Kemiskinan;
2. Masih rendah Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas;
3. belum memadai Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas;
4. belum maksimal Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

- 5. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) belum optimal dan manajemen/pengelola yang belum professional;
- 6. Belum adanya sarana prasarana/tempat perlindungan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 7. Belum seimbang laju pertumbuhan/ tingginya laju pertumbuhan penduduk;
- 8. Rendanya kesadaran masyarakat tentang Keluarga Berencana.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah :

- 1. Peningkatan Pelayanan, perlindungan, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial serta rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2. Peningkatan kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas melalui pemberian keterampilan sesuai minat dan potensi penyandang disabilitas;
- 3. Bersinergi dengan SKPD terkait agar penyandang disabilitas mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum;
- 4. Pembinaan dan optimalisasi peran/keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya kesejahteraan sosial;
- 5. Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 6. Penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang peduli pada masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- 7. Menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran bayi;
- 8. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program KB melalui, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga

Tabel III.4.
Identifikasi isu-isu strategis lingkungan Eksternal

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/lokal	Lain-lain
1	Tingginya angka Kemiskinan	Tingginya angka kemiskinan dan PMKS	Tingginya angka kemiskinan, Peringkat kedua terbawah di Provinsi Jawa Tengah	-
			Belum optimalnya peran PSKS dan LKS dalam pelayanan penanganan PMKS	-

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/lokal	Lain-lain
			Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah	-
2	Penduduk belum Tumbuh Seimbang	Belum optimalnya pengendalian laju Pertumbuhan Penduduk	Belum mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas	-
		Rendanya kesadaran masyarakat tentang Keluarga Berencana	Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap program KB dan rendanya pemahaman masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga	-

D. Penentuan Isu-isu Strategis.

ari tebaran masalah di atas, maka dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan memperhatikan bahwa isu tersebut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran rencana strategis
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. Berdampak besar pada publik

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut:

- 1. Tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2. Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah;
- 3. Rendanya pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana;
- 4. Belum optimalnya pengendalian laju Pertumbuhan Penduduk.

E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

Berdasarkan kondisi bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial dan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kebumen maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. Adanya Kewenangan wajib pelayanan dasar di bidang sosial;
- b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta mekanisme kerja yang sudah ada;
- c. Kualitas SDM Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA
- d. Adanya peningkatan kualitas manajemen layanan Keluarga Berencana melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan keluarga
- e. Adanya kebijakan tentang pembangunan kependudukan di daerah

2. Kelemahan

- a. Urusan Sosial merupakan wajib pelayan dasar tidak diikuti dengan besarnya anggaran.
- b. Adanya Peraturan Perundang undangan tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja SDM dan Mekanisme kerja yang ada tidak mampu untuk memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan
- c. Minimnya jumlah karyawan dibidang dan latar belakang pendidikan membuat penyelenggaraan pelayanan belum Optimal
- d. Belum Optimalnya kelembagaan dan pemberdayaan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dan pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana;Melemahnya nilai-nilai baik kesetiakawanan sosial maupun keperdulian sosial
- e. Dokumen yang disusun Dinsos PPKB belum sepenuhnya sinergis dengan program dan kegiatan;
- f. Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai
- g. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial
- h. Jaringan sistem informasi sosial dan kependudukan belum optimal

Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial.

- b. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.
 - c. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat
 - d. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan.
 - e. Meningkatnya Fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
 - f. Komitmen Mitra Kerja lainnya tentang Keluarga Berencana
2. Tantangan
- a. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
 - b. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan
 - c. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
 - d. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi PMKS,
 - e. Rasio petugas lapangan keluarga berencana dengan jumlah desa yang tidak proporsional diperlukan peningkatan kinerja bagi tenaga lapangan
 - f. Sarana prasarana yang ada dilapangan tidak proposional dengan tuntutan terhadap pelayanan Keluarga Berencana yang harus memadai
 - g. Laju Pertumbuhan penduduk yang meningkat
 - h. Otonomi daerah berdampak pada kurangnya komitmen pembentukan kelembagaan Keluarga Berencana

Untuk menyusun strategi yang tepat dari keadaan lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Kebumen, tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Analisa SWOT

Faktor External	KEKUATAN	KELEMAHAN
Faktor Internal	1. Adanyan Kewenangan wajib pelayanan dasar di bidang sosial 2. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan	1. Urusan Sosial merupakan wajib pelayan dasar tidak diikuti dengan besanya anggaran. 2. Adanya Peraturan Perundang undangan tidak dibarengi dengan

	managemen kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta mekanisme kerja yang sudah ada; 3. Kualitas SDM Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA; 4. Adanya peningkatan kualitas manajemen layanan Keluarga Berencana melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan keluarga Adanya peningkatan kualitas manajemen layanan Keluarga Berencana melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan keluarga; 5. Adanya kebijakan tentang pembangunan kependudukan di daerah;	peningkatan kualitas kinerja SDM dan Mekanisme kerja yang ada tidak mampu untuk memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan 3. Minimnya jumlah karyawan dibidang dan latar belakang pendidikan membuat penyelenggaraan pelayanan belum Optimal; 4. Belum Optimalnya kelembagaan dan pemberdayaan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dan pemahamam masyarakat tentang Kelaurga Berencana; 5. Kurangnya Sosialisasi dan rendahnya pemahamam masyarakat tentang pembangunan kependudukan di daerah;
PELUANG 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan	Strategi S + O 1. Urusan Bidang Sosial merupakan urusan wajib pelayanan Dasar yang merupakan tanggung jawab pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;	Strategi W + O 1. Dalam penyelenggaran pelayanan kesejahteraan sosial juga melibatkan masyarakat dan peran akatif dunia usaha;

kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha;		
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten /Kota;	2. Melaksanakan kebijakan di daerah yang menjadi tanggung jawab Kabupaten dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain atau pihak lain yang terkait;	2. Mengidentifikasi urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;	3. Komitmen Pemerintah, Provinsi, maupun Kabupaten yang masih Kosen terhadap masalah Kemiskinan untuk menjadi perhatian yang utama;	3. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kemiskinan yang menjadi perhatian utama;
4. Komitmen Mitra Kerja lainnya;	4. Mengoptimalkan Peran dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan	4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam

	Sosial;	pelayanan kesejahteraan Sosial;
ANCAMAN	Strategi S + T	Strategi W+– T
1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;	1. Dengan semakin kompleks permasalahan PMKS maka SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus ditingkatkan;	1. Peningkatan Kompleksitas permasalahan PMKS berimbas pada peningkatn anggaran dan kemampuan SDM;
2. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan;	2. Meningkatkan Penanganan anak jalan di luar Panti yang menjadi tanggung jawab Kabupaten;	2. Meningkatkan koordinasi dengan isntasi terkait untuk penangan anak jalanan luar panti menjadi dalam panti yang menjadi tanggung jawab Provinsi;
3. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial;	3. Mengoptimalkan banyaknya SDM aparatur penyelenggar kesejahteraan Sosial dengan melibatkan peran PSKS;	3. Tingkatkan kemampuan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial;
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyenggaraan usaha kesejahteraan	4. Mengoptimalkan peran lembaga sosial dan PSKS dalam pelayanan pelayanan kesejahteraan sosial;	4. Tingkatkan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat tidak berorientasi provit;

sosial yang berkualitas bagi PMKS;		
5. Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan penanganan PMKS;	5. Mengoptimalkan kapasitas PSKS sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS;	5. Meningkatkan Kemampuan SDM PSKS dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS;
6. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional diperlukan peningkatan kinerja bagi tenaga lapangan;	6. Mengoptimalkan Sub. PPKBD dan Kader dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pelayanan masyarakat;	6. Meningkatkan Kemampuan PLKB dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pelayanan masyarakat;
7. Sarana prasarana yang ada dilapangan tidak proposional dengan tuntutan terhadap pelayanan KB yang harus memadai;	7. Mengoptimalkan anggaran DAK untuk pengadaan sarana dan prasarana di lapangan;	7. Meningkatkan kerjasama dengan Intasi terkait dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada;
8. Laju Pertumbuhan penduduk yang meningkat .	8. Mengendalikan angka kelahiran sebagai upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	8. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program KB melalui, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

A. Visi Bupati Kebumen

Visi : “ Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

B. Misi Bupati Kebumen:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
2. Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensial intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitra dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
6. Memperkuat sekaligus tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel yang didukung dengan system pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

C.1. Tujuan

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan pemberdayaan Pontensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan keluarga sejahtera dan peningkatan peserta KB Aktif
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

C.2. Sasaran

1. Meningkatnya jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat pelayanan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pontensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam rangka pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
4. Meningkatnya peserta KB Aktif
5. Meningkatnya kinerja layanan perangkat daerah

Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT	Meningkatnya Cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT	Jumlah cakupan layanan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dan KAT	60 KK	120 KK	140 KK	160 KK	180 KK	200 KK	900 KK
2	Peningkatan cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial	Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial	Jumlah capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial	-	10 lbg (64 Org)	15 lbg (64 Org)	20 lbg (64 Org)	20 lbg (64 Org)	22 lbg (70 Org)	97 lbg (70 Org)
3	Peningkatan Jumlah Layanan atas Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat	81 KK	60 KK	80 KK	100 KK	120 KK	130 KK	529 KK
4	Peningkatan Layanan Rehabilitasi Terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza dan LKS	Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah	Jumlah layanan rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza dan LKS	105 Org	135 Org	210 Org	285 Org	370 Org	480 Org	1.750 Org

No	Sasaran	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					Target Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan							
2.	Pemberdayaan PSKS	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS							
3.	Meningkatnya upaya fasilitasi kelompok bina keluarga	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera							
4.	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Cakupan Peserta KB Aktif							
5.	Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah								

Secara teknis tujuan dan saran dapat dijabarkan melalui bidang teknis :

- a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui:
 - (1) Peningkatan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin;
 - (2) Peningkatan kaulitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - (3) Peningkatan kaulitas, kuantitas dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
 - b. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui:
 - (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya untuk mendukung pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial;
 - (2) Peningkatan kapasitas dan motivasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan keluarga sejahtera.
 - d. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan peserta KB Aktif
 - e. Meningkatkan kinerja layanan perangkat daerah
- D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

Strategi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui:

1. Pendampingan dan Perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan;
2. Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan;
3. Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya;
5. Peningkatan Kesadaran dan Tanggungjawab Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan

kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

Kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui:

1. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan anak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat), Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
3. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS eks penyandang penyakit sosial.
4. Penguatan kapasitas PSKS (motivasional, pengetahuan, ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam penanganan PMKS
5. Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Komunitas Adat Terpencil serta Meningkatkan semangat keperintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.
6. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana, pengerahan TAGANA di lokasi Bencana serta Penyiapan TAGANA yang tangguh.
7. Pengawasan pelaksanaan undian berhadiah (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB).
8. Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal.
9. Fasilitasi Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kebumen.
10. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan dan profesional.
11. Membangun kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
13. Penyediaan sarana dan prasarana balai rehabilitasi sosial milik pemerintah provinsi yang memadai.
14. Penyediaan SOSH permakanan Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial, Kelayan Panti Swasta, permakanan orang terlantar.
15. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan oleh SKPD adalah sebagai berikut :

Secara garis besar, program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup 19 program 46 kegiatan yang terangkum dalam empat urusan pemerintahan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

➤ Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, dengan kegiatan antara lain:
 1. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.
 2. Fasilitasi usaha bagi keluarga miskin.
 3. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan antara lain:
 4. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.
 5. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana.
 6. Pendataan PMKS dan PSKS.
3. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan:
 7. Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo, dengan kegiatan:
 8. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, dengan kegiatan:
 9. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan antara lain:
 10. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
 11. Peningkat jenjang kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

12. Peningkatan Kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
13. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
- b. Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar.
 - Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:
 14. Pengembangan data base kependudukan
 - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan antara lain:
 15. Pelayanan KIE.
 16. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu.
 17. Pembinaan petugas keluarga berencana.
 18. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)
9. Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan antara lain:
 19. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.
 20. Pelayanan KB medis operasi
10. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dengan kegiatan:
 21. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
11. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat, dengan kegiatan:
 22. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
12. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, dengan kegiatan:
 23. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
13. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dengan kegiatan:
 24. Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga
 - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif, dengan kegiatan:
 25. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - Statistik
15. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah, dengan kegiatan:
 26. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.
- c. Fungsi Penunjang Urusan Non Pemerintahan
 - Perencanaan Pembangunan
16. Program pengembangan data/informasi, dengan kegiatan:
 27. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
17. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan kegiatan:
 28. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

- d. Non Urusan
 - Program Pendukung Operasional OPD meliputi:
 - 18. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 29. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 30. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 31. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
 - 32. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 33. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 34. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor
 - 35. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 36. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 37. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 38. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 39. Penyediaan makanan dan minuman
 - 40. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 41. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - 19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 42. Pengadaan Kendaraan roda dua Dinas/Operasional
 - 43. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
 - 44. Pengadaan Mebeleur
 - 45. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor
 - 46. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur

Tabel 5.1. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Beserta Pendaannya Tahun 2016 - 2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi pada akhir Periode Renstra		
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan , pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan peserta KB Aktif	Capaian pembinaan keluarga sejahtera sebesar 32,37 %	Meningkatnya upaya fasilitasi kelompok bina keluarga	Cakupan Pembinaan Keluaraga Sejahtera	Jumlah kelompok sasaran binaan yang difasilitasi / jumlah kelompok sasaran binaan x 100%		%		32,01		32,13		32,15		32,24		32,31		32,37		32,37		DINSOS PPKB
					Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pemberdayaan kader kelompok Tribina	Kel	156	100	50.000	156	54.726	120	140.000	125	147.000	130	155.000	130	160.000	661		DINSOS PPKB
					Pemberdayaan BKB, BKR, BKL dan Bina Lembaga Keluarga.	Orientasi Kader dan Pembinaan kelompok Tribina (BKB,BKR dan BKL)	Kel	156	100	50.000	156	54.726	120	140.000	125	147.000	130	155.000	130	160.000	661		DINSOS PPKB
					Program dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduksif	Meningkatkan jumlah kegiatan dan beragam jenis usah kelompok	Kel	33	120	70.000	104	61.163	78	220.000	80	231.000	80	235.000	80	240.000	542		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
gikemiskinan					Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.	Orientasi 120 Kader Klpk UPPKS, 7 kelompok bantuan peralatan UPPKS.	Kel	33	120	70.000	104	61.163	78	220.000	80	231.000	80	235.000	80	240.000	542		DINSOS PPKB
		Capaian peserta KB Atif sebesar 85,50 %	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan Peserta aKB Aktif	Jumlah peserta KB aktif/ Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) x100%		%	-	84,70		84,75		84,80		84,90		85,10		85,50		85,50		DINSOS PPKB
					Program Keluarga Berencana	Peningkatan pelayanan KB dikecamatan	%		100	4.159.539	100	3.785.536	100	4.317.510	100	2.001.450	100	2.010.000	100	2.100.000	100		DINSOS PPKB
					Pelayanan KIE	Terlaksananya KIE dan edukasi Pembangunan	Kec	26	26	40.000	26	40.000	26	60.000	26	60.000	26	60.000	26		DINSOS PPKB		
					Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Lokakarya peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	orang	0	0	0	0	450	20.000	450	20.100	450	23.000	450	25.000	450		DINSOS PPKB	
					Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan PPKD, Sub PPKBD, Petugas Pencatatan dan pelaporan	orang	460	2681	1.905.000	460	1.749.996	2687	2.256.060	2.687	2.256.060	2687	2.260.000	2687	2.670.000	11.208		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-			KB																	
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB	pengadaan sarana dan prasaran fungsional pelayanan KB	Paket		5	2.214.539	4	1.995.540	4	2.001.450	4	2.001.450	4	2.010.000	4	2.100.000	25		DINSOS PPKB
					Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan pelayanan KB Aktif	%	84,50	84,70	377.500	84,75	183.000	84,80	300.000	84,90	400.000	85,10	407.000	85,50	397.000	85,50		DINSOS PPKB
					Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Terlayannya calon akseptor IMP, IUD, SUNTIK, PIL, KONDOM	Orang	155.134	155.929	42.500	155.929	40.000	157.189	50.000	162.816	70.000	167.742	72.000	170.651	57.000	814.327		DINSOS PPKB
					Pelayanan KB Medis Operasi	Terlayannya Peserta KB MOW dan MOP	Orang	100	600	275.000	113	143.000	150	250.000	200	330.000	200	335.000	200	340.000	863		DINSOS PPKB
					Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terbentuknya kampung KB	Kecamatan	50	42	60.000	26	160.000	26	150.000	26	157.500	26	160.000	26	160.000	130.000		DINSOS PPKB
					Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terbentuknya kampung KB	Kecamatan	0	0	0	26	160.000	26	150.000	26	157.500	26	160.000	26	160	130		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kesehatan dimasyarakat	Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak	orang	0	0	0	0	0	400	50.000	400	52.500	400	55.000	400	57.500	1.600		DINSOS PPKB
					Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat	Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak	orang	0	0	0	0	0	400	50.000	400	52.500	400	55.000	400	57.500	1.600		DINSOS PPKB
					Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Terfasilitasinya forum pelayanan PIK remaja	0	0	0	0	0	0	450	60.000	450	80.000	500	75.000	600	100.000	2.000		DINSOS PPKB
					Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terfasilitasi forum pelayanan PIK remaja	0	0	0	0	0	0	450	60.000	450	80.000	500	75.000	600	100.000	2.000		DINSOS PPKB
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Mengurangi Angka Kemiskinan	Berkurangnya angka kemiskinan menjadi 15,45% pada tahun 2021	Mengurangi Angka Kemiskinan	420	157	1.250.000	50,706	906.048	50.822	1.150.000	60.000	16,98	45.892.500	110.532	45.900.000	70.532	15.920.000	2.000		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	sejahtera				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Keluarga Sangat Miskin (KSM)	420	157	1.250.000	50,706	906,048	50,822	1.150.000	450	45.892.500	110.532	45.900.000	70.532	15.920.000	121.837		DINSOS PPKB
					1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Terlaksananya Program Keluarga Harapan	Keluarga penerima manfaat	420	30.617	700.000	50.451	539.843	50.457	700.000	50.457	735.000	50.457	740.000	50.457	750.000	51.000		DINSOS PPKB
					2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Bantuan usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin	KK	213	157	350.000	95	216.205	150	300.000	30.000	45.000.000	30.000	45.000.000	10.000	15.000.000	70.402		DINSOS PPKB
					3. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Bantuan usaha ekonomi produktif bagi Lanjut Usia Produktif	KK		90	200.000	65	150.000	65	150.000	65	157.500	75	160.000	75	170.000	435		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial																	
						Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat										283.500							
					1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi Antar, Anjal, Ancat dan Ankal	Orang	20	148	150.000	123	100.000	140	150.000	140	157.500	150	175.000	150	175.000	851		DINSOS PPKB
					2. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban	Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban bencana	Orang	26	50	20.000	125	55.320	125	75.000	125	75.000	125	75.000	125	75.000	675		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					bencana																		
					3. Pendataan PMKS dan PSKS	Tersedianya data PMKS non Kemiskinan	Dok	0	0	0	1	60.000	1	60.000	1	63.000	1	65.000	1	66.000	1		DINSOS PPKB
					Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	20	204	350.000	151	225.000	100	200.000	200	500.000	250	600.000	300	650.000	1.001		DINSOS PPKB
					Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya pembinaan kemendiraan dan produktifitas Disabilitas	Orang	26	204	350.000	151	225.000	100	200.000	200	500.000	250	600.000	300	650.000	1.001		DINSOS PPKB
					Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Prosentase panti sosial yang menyediakan sarana prasaranape layanan kesejahteraan sosial	Orang	225	650	350.000	650	268.400	650	400.000	650	420.000	650	420.000	650	425.000	3.250		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Pemberian bantuan kebutuhan dasar panti dan anak panti	Orang	225	650	350.000	650	268.400	650	400.000	650	420.000	650	420.000	650	425.000	3.250		DINSOS PPKB
					Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase PMKS yang menerima pembersos melalui KUBE atau sejenisnya	%	25	84	200.000	40	100.000	60	175.000	70	210.000	75	210.000	75	210.000	325		DINSOS PPKB
					Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terbinanya Eks Napi, ODHA dan Penyakit Sosial lainnya	Orang	32	84	200.000	40	100.000	65	175.000	70	210.000	75	210.000	75	210.000	325		DINSOS PPKB
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yang menerima pembersos melalui KUBE atau sejenisnya								690.000		726.000							DINSOS PPKB
					1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Bantuan UEP bagi masy. Miskin dan Veteran/	Orang	20	20	35.000	20	40.000	20	40.000	20	42.000	20	45.000	20	50.000	60		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						keluarganya																	
					2. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terbinanya Pengurus Orsos, Panti, dan Pelaku UKS	Orang	35	35	35.000	35	40.000	36	40.000	36	42.000	36	43.000	36	45.000	179		DINSOS PPKB
					3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terbinanya Karang taruna, WRSE, TKSK dan PSKS	Orang	52	111	450.000	98	321.817	96	350.000	96	367.000	96	380.000	96	385.000	482		DINSOS PPKB
					4. Pengembangan model kelembagaan	Terfalisasinya UPTP2K	bulan	0	0	0	12	238.670	12	260.000	12	275.000	12	275.000	12	275.000	60		DINSOS PPKB
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepekerjaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program		%	100			92		93		94		95		96				DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ntahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan	r pemerintah	sebesar 96%		kat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%		15	543.585	15	624.300	20	592.000	15	636.800	20	668.300	20	697.800	100		DINSOS PPKB
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	40.085	12	79.800	12	80.000	12	84.000	12	90.000	12	95.000	72		DINSOS PPKB
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	40.085	12	79.800	12	80.000	12	84.000	12	90.000	12	95.000	72		DINSOS PPKB
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	243.000	12	250.000	12	200.000	12	210.000	12	215.000	12	220.000	72		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												LOKASI	SKPD Penanggungjawab	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi pada akhir Periode Renstra
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
n dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	36.000	12	38.000	12	45.000	12	47.000	12	50.000	12	55.000	72		DINSOS PPKB
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	10.000	12	22.000	12	35.000	12	42.000	12	45.000	12	47.000	72		DINSOS PPKB
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Bulan	12	12	28.000	12	25.000	12	25.000	12	26.500	12	27.000	12	27.500	72		DINSOS PPKB
					Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	40.000	12	30.000	12	30.000	12	32.000	12	33.000	12	35.000	72		DINSOS PPKB
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	16.000	12	16.000	12	26.000	12	28.000	12	28.500	12	29.000	72		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												LOKASI	SKPD Penanggungjawab	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi pada akhir Periode Renstra
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan alat penerangan kantor	Bulan	12	12	5.000	12	6.000	12	10.000	12	12.000	12	13.000	12	14.000	72		DINSOS PPKB
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	2.000	12	2.000	12	4.000	12	4.200	12	4.600	12	4.800	72		BPPKB
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	Bulan	12	12	40.000	12	40.000	12	45.000	12	54.000	12	58.000	12	59.000	72		DINOS PPKB
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan	12	12	50.000	12	100.000	12	77.000	12	80.000	12	85.000	12	90.000	72		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												LOKASI	SKPD Penanggungjawab	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi pada akhir Periode Renstra
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	32.000	12	14.000	12	13.000	12	15.000	12	17.000	12	19.000	72		DINSOS PPKB
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%		100	2.162.500	100	1.544.968	20	1.697.000	20	818.000	19	819.000	15	819.000	270		DINSOS PPKB
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi kendaraan roda dua operasional Dinas	unit	0	0	0	0	0	6	116.000	4	75.000	0	0	0	0	10		DINSOS PPKB
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor: LCD, Komputer, Faximile, Printer, Laptop	Unit		4	35.000	13	30.000	8	45.000	10	54.000	10	60.000	10	65.000	55		DINSOS PPKB
					Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan kantor berupa mebeleur : Kursi kerja, kursi rapat, meja rapat, lemari arsip	Buah		8	15.500	300	25.000	17	37.000	130	72.000	20	40.000	50	45.000	525		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra	LOKASI	SKPD Penanggungjawab
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah untuk ruang rapat dan gudang alkon	Paket		0	0	0	0	-	1.446.000	0	0	0	0	0	0			DINSOS PPKB
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor Dinsos PPKB dan UPT P2K	Unit	1	1	20.000	2	24.000	2	50.000	2	50.000	2	52.000	2	55.000	11		DINSOS PPKB
					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharaan ya mebeler kantor	Bulan		12	6.000	12	6.000	12	3.000	12	3.350	12	3.500	12	3.700	72		DINSOS PPKB
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Pagar, aula dan paving gedung kantor	Paket	3	2	640.000	5	1.459.986	0	0	1	400.000	0	0	0	0	5		DINSOS PPKB
					Program Pengembangan Data/Informatika	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Dok		4	25.000	5	21.000	5	50.000	5	55.000	5	57.000	5	60.000	29		DINSOS PPKB
					Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan (Renja, Renstra LAKIP,LPPD)	Dok		4	25.000	5	21.000	5	50.000	5	55.000	5	57.000	5	60.000	29		DINSOS PPKB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												LOKASI	SKPD Penanggungjawab	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi pada akhir Periode Renstra
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Program Pengembangan Data/Informatika/Statistik Daerah	Tersedianya dokumen database perangkat daerah	Dok		1	10.000	1	7.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1		DINSOS PPKB
					Keg. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya database Sosial PPKB	Dok		1	10.000	1	7.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1		DINSOS PPKB
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB	Orang	78	78	13.000	75	13.500	75	15.500	75	16.000	75	17.500	75	20.000	453		DINSOS PPKB
					Keg. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB	Orang	78	78	13.000	75	13.500	75	15.500	75	16.000	75	15.000	75	20.000	75		DINSOS PPKB
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Teridentifikasinya data kependudukan	Desa	460	460	40.000	1	37.178	460	40.000	460	42.000	460	65.000	460	65.000	75		DINSOS PPKB
					Pengembangan data Base Kependudukan	Identifikasi data kependudukan	Dok	0	0	40.000	1	37.178	1	40.000	1	42.000	1	65.000	1	65.000	2.300		DINSOS PPKB
Total Anggaran DINSOS PPKB										6.276.124		8.847.626		10.542.010		53.691.750		53.819.300		24.072.300			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain Indikator kinerja, indeks pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen termasuk pada aspek pelayanan umum, sebagaimana disajikan dalam table 6.1.

TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD YANG MENDUKUNG CAPAIAN IKU DAERAH DALAM RPJMD
KABUPATEN KEBUMEN 2016-2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Prosentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		%	57,63	58,23	58,83	59,43	60,03	60,63

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah peserta KB aktif/ Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) x100%	%	84,70	84,75	84,80	84,90	85,10	85,50
				Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah kelompok sasaran binaan yang difasilitasi / jumlah kelompok sasaran binaan x 100%	%	31,56	32,13	32,15	32,24	32,31	32,37

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Cakupan pertumbuhan penduduk menurun	jumlah penduduk tahun n-th (n-1) / jumlah penduduk tahun n-1 x 100%	%	0,27	0,26	0,23	0,19	0,16	0,14

BAB VII

PENUTUP

Dinamika masyarakat dan pemerintahan mengalami perubahan yang sangat cepat dan menuntut adanya hasil pelayanan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas pelayanan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program dan kegiatan yang pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan adalah untuk mewujudkan tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021. sangat penting mendukung pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2021, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Rencana strategis baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana strategis Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang). Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, program dan stardar kinerja merupakan pedoman bagi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Dokumen Rencana strategis ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BAP3DA Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk menyusun rencana kerja

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana strategis dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, yang merupakan acuan dalam upaya penguatan stakeholders dalam penjabaran Rencana strategis ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Rencana strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan indikator kinerja program/kegiatan lima tahunan, juga menjadi dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun.

Demikian Rencana strategis disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN

dr. A. DWI BUDI SATRIO, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19620303 198901 1002